

Wali Kota Jamin Program Prioritas Tidak Terganggu Meski Ada Kebijakan Efisiensi Anggaran

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan menghambat jalannya pemerintahan maupun proyek pembangunan di Kota Tepian. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama kepala daerah lain dari Partai Gerindra menerima arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam sebuah pertemuan di Hambalang, Bogor, pekan lalu.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah mengenai strategi efisiensi anggaran di berbagai sektor. Menurut Andi Harun, pemerintah pusat berencana melakukan efisiensi anggaran hingga tiga tahap, dengan total penghematan mencapai Rp750 triliun. Langkah ini dilakukan dengan memangkas belanja yang dianggap tidak prioritas di hampir semua kementerian.

"Efisiensi ini tidak akan berdampak pada jalannya pemerintahan dan pembangunan. Isu yang menyebutkan sebaliknya tidak benar. Anggaran yang dipangkas bukan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik," jelasnya.

Dari total anggaran yang dihemat, separuhnya akan dialokasikan untuk belanja strategis, seperti penguatan sektor pertahanan dan program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sisanya akan diinvestasikan kembali dalam proyek-proyek bernilai kapitalisasi tinggi, yang diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Andi Harun juga menyebut hilirisasi industri sebagai calon satu sektor yang akan mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan ini. Ia optimis langkah tersebut dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional secara signifikan. Dengan strategi ini, kita berharap dalam tiga hingga empat tahun ke depan, Indonesia memiliki pondasi ekonomi yang kuat tanpa bergantung pada utang luar negeri," ujarnya.

Di Samarinda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan diskusi awal terkait kebijakan efisiensi anggaran yang merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pembahasan ini mencakup pemetaan sektor mana yang akan terdampak serta nilai penghematannya.

"Yang jelas tidak akan terganggu. Seperti pengendalian banjir dan Probebaya (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Red) yang tetap pasti akan berjalan sesuai perencanaan kami," pungkasnya.

(ai/ht/mm)

Sumber Berita :

1. Korankaltim, Wali Kota Jamin Program Prioritas Tidak Terganggu Meski Ada Kebijakan Efisiensi Anggaran, 19/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

